

**IMPLEMENTASI PASAL 7 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
NOMOR 35/M-DAG/PER/7/2013 TENTANG PENCANTUMAN HARGA
BARANG DAN TARIF JASA YANG DIPERDAGANGKAN DI WILAYAH
HUKUM KOTA SINGARAJA**

Oleh:

Komang Try Adnyana Putra, NIM. 2014101091

Program Studi Ilmu Hukum

ABSTRAK

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui (1) Implementasi Pasal 7 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 bertanggung jawab atas kebenaran harga barang dan/atau tarif jasa yang dicantumkan dan perbedaan antara harga barang atau tarif jasa yang dicantumkan dengan harga atau tarif yang dikenakan pada saat pembayaran di wilayah Kota Singaraja dan (2) mengetahui akibat hukum terhadap pelaku usaha dalam perbedaan harga yang dicantumkan dengan harga/tarif barang yang dibayarkan sesuai dengan Pasal 7 Ayat 2 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/7/. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris, Adapun sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian bersifat deskriptif dengan teknik penentuan sampel yang digunakan adalah *non probability sampling* dengan bentuk *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, serta studi dokumen. Subyek penelitian ini adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Buleleng (DISDAGPRINKOPUKM), pelaku usaha yang memperdagangkan barang dan produknya serta konsumen sebagai pihak yang melaksanakan pembelian barang atau produk yang dibeli. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pelaksanaan terkait adanya perbedaan antara harga barang atau tarif jasa yang dicantumkan dengan harga atau tarif yang dikenakan pada saat pembayaran adalah harga yang terendah masih tidak sepenuhnya terlaksana dengan baik dimana masih banyak pelaku usaha yang tidak menjalankan kewajiban serta tanggung jawabnya dengan baik dan konsumen yang masih menghiraukannya. (2) Akibat hukum berdasarkan hasil wawancara dengan pihak DISDAGPRINKOPUKM, penyelesaian sengketa terhadap pelaku usaha di Kota Singaraja, dengan melalui jalur penyelesaian sengketa nonlitigasi (diluar pengadilan).

Kata Kunci : Peraturan Menteri Perdagangan, Pencantuman Harga Barang,
Mini Market.

**IMPLEMENTATION OF ARTICLE 7 REGULATION OF THE MINISTER
OF TRADE NUMBER 35/M-DAG/PER/7/2013 CONCERNING THE
INCLUSION OF PRICES OF GOODS AND TARIFFS FOR SERVICES
TRADED IN THE JURISDICTION OF THE CITY OF SINGARAJA**

By:

Komang Try Adnyana Putra, NIM. 2014101091

Law Department

ABSTRACT

This research aims to find out (1) The implementation of Article 7 of the Minister of Trade Regulation Number 35/M-DAG/PER/7/2013 is responsible for the correctness of the prices of goods and/or service rates listed and the difference between the prices of goods or service rates listed with the price or tariff charged at the time of payment in the Singaraja City area and (2) knowing the legal consequences for business actors in the difference between the price stated and the price/tariff for goods paid in accordance with Article 7 Paragraph 2 of Minister of Trade Regulation Number 35/M-DAG /PER/7/. The type of research used in this research is empirical research. The nature of the research used is descriptive research with the sampling technique used is non-probability sampling in the form of purposive sampling. Data collection techniques were carried out by means of observation, interviews and document study. The subjects of this research are the Department of Cooperatives, Small and Medium Enterprises, Industry and Trade, Buleleng Regency (DISDAGPRINKOPUKM), business actors who trade goods and products and consumers as parties who purchase the goods or products purchased. The results of the research show that (1) implementation related to the difference between the price of goods or service rates listed and the price or rate charged at the time of payment, namely the lowest price, is still not fully implemented well, where there are still many business actors who do not carry out their obligations and responsibilities. well and consumers still pay attention to it. (2) Legal consequences based on the results of interviews with DISDAGPRINKOPUKM, dispute resolution against business actors in Singaraja City, using non-litigation dispute resolution (outside of court).

Keywords : Regulation Ministry of Trade, Inclusion of Goods Prices
MiniMarket.